

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah (Sartika *et al.*, 2019).

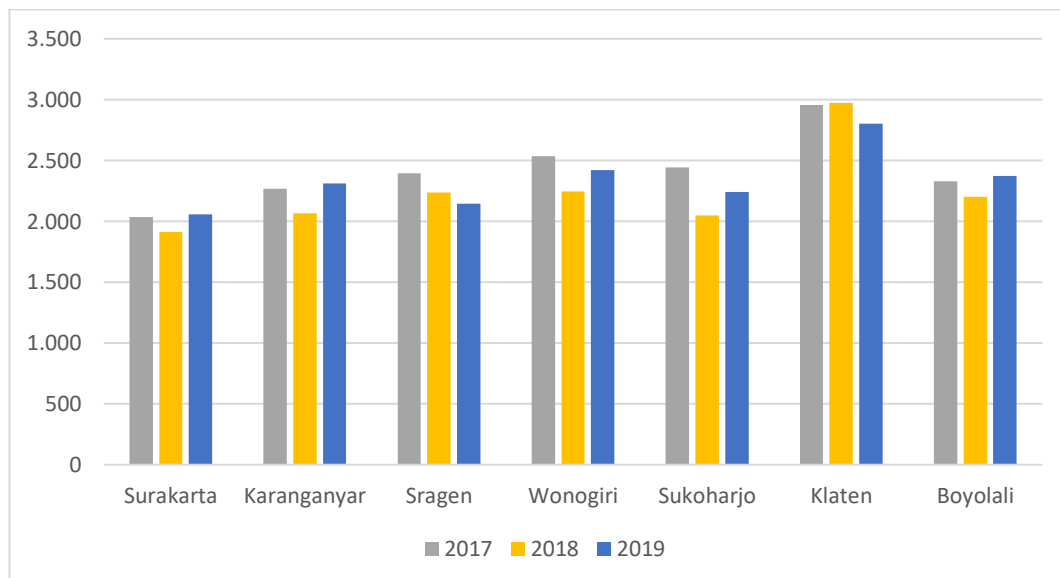
Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan tetapi juga diberikan kewenangan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan (Afiyah, 2011).

Sumber pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber paling penting dalam urusan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. PAD mencerminkan kemandirian daerah tersebut, akan tetapi peranan PAD di dalam

penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah (Julfiansyah, 2013).

Eks Karesidenan Surakarta yang meliputi Kota Surakarta dan 6 Kabupaten yaitu Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen dan Karanganyar merupakan kawasan yang memiliki integrasi ekonomi serta salah satu kawasan penyokong utama perekonomian di Jawa Tengah. Masing-masing wilayah tersebut memiliki potensi daerah dan keunggulan dalam beberapa aspek pendapatannya. Berikut perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta selama periode 2017-2019.

Grafik 1. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karesidenan Surakarta (Miliar Rupiah)



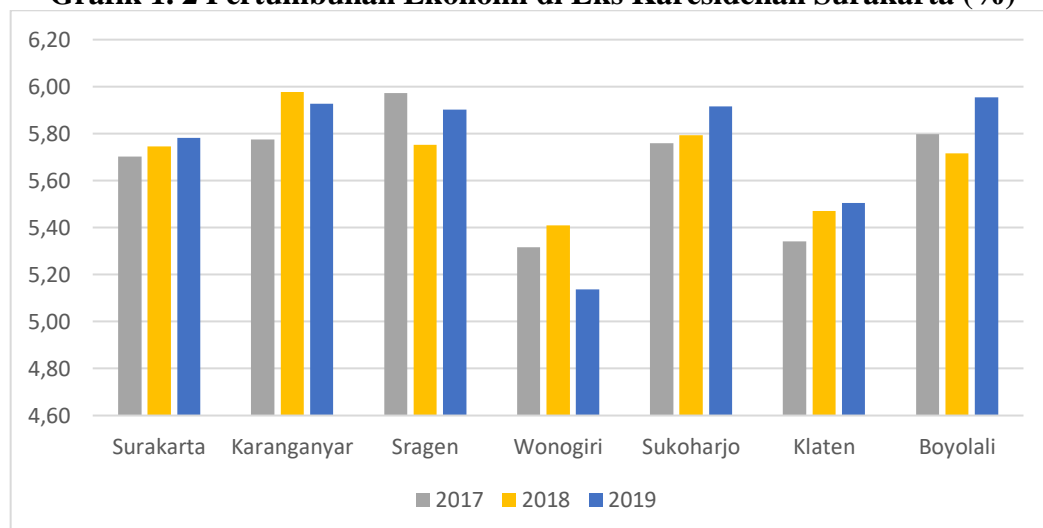
Sumber: BPS data (diolah)

Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks Karesidenan Surakarta berfluktuasi. Kabupaten Klaten memiliki rata-rata PAD sebesar 2.910 miliar rupiah dan menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain, hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan dari sektor perhotelan

dan restoran di wilayah tersebut. PAD tertinggi terjadi di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dengan PAD sebesar 2.973 miliar rupiah. Kota Surakarta pada tahun 2018 menjadi daerah dengan PAD terendah selama periode ini dengan penerimaan sebesar 1.914 miliar rupiah.

Menurut Sartika *et al.* (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Secara teori apabila PAD naik, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan ikut naik. Peningkatan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta (%)



Sumber: BPS data (diolah)

Grafik 1.2 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam

periode ini terjadi di Karanganyar pada tahun 2018 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,98%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah pada tahun 2019 di Wonogiri dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,14%.

Investasi merupakan salah satu faktor utama dalam perekonomian suatu wilayah, investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi ini biasanya berupa pendirian atau ekspansi perusahaan luar negeri dan berproduksi di Indonesia agar dapat menekan biaya produksi (Julfiansyah, 2013).

Tabel 1. 1 PMA di Eks Karesidenan Surakarta (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Surakarta	10,94	0,08	0,63
Karanganyar	3,47	7,52	13,75
Sragen	3,05	5,10	1,75
Wonogiri	6,06	0,12	1,10
Sukoharjo	160,72	53,68	4,86
Klaten	6,37	3,09	3,21
Boyolali	18,53	15,26	8,20

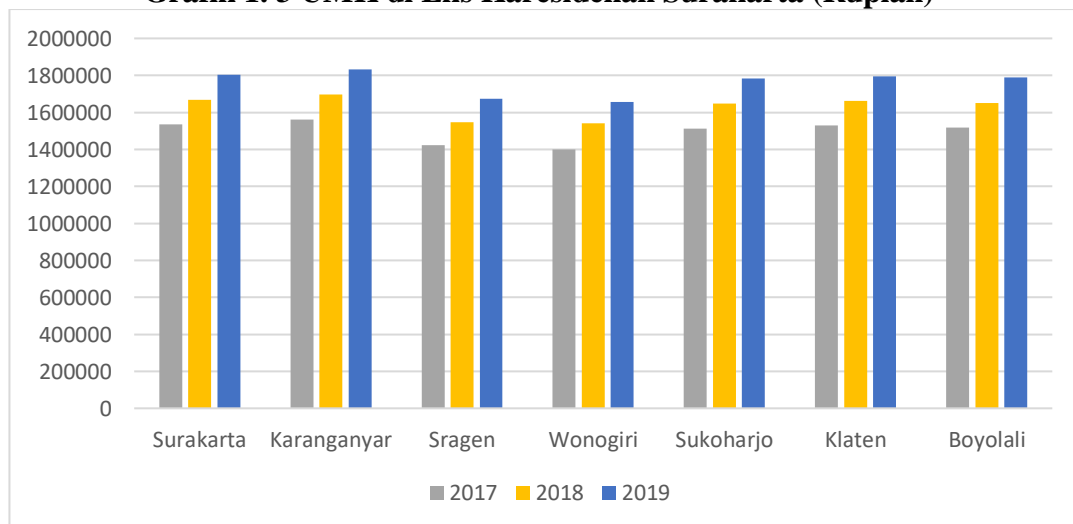
Sumber: BPS (diolah)

Tabel 1.1 memperlihatkan penyerapan investasi asing di Kabupaten Sukoharjo lebih unggul jika dibandingkan dengan wilayah lain selama periode waktu 2017-2019. Pada periode ini banyak terjadi pembangunan-pembangunan yang mengandalkan penanaman modal dari pihak asing. Pada tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah dengan penanaman modal asing (PMA) tertinggi dengan nilai investasi sebesar 160,72 miliar rupiah. Sementara itu, Kota

Surakarta pada tahun 2018 menjadi daerah dengan penerimaan PMA terendah dengan 0,08 miliar rupiah investasi asing yang masuk.

Selain investasi, tingkat upah minimum di suatu wilayah juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi pendapatan wilayah tersebut. Upah Minimum Kabupaten atau Kota adalah upah yang berlaku hanya di sebuah Kabupaten/Kota. Upah merupakan faktor utama yang dapat mendorong semangat kerja, jika tingkat upah naik maka pendapatan masyarakat atau para pekerja juga akan naik. Sehingga menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat meningkat, dengan kondisi seperti ini produksi atau nilai output juga bertambah sehingga dalam pemenuhan permintaan dan konsumsi masyarakat akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor penerimaan seperti pajak dan retribusi (Rahman & Chamelia, 2015).

Grafik 1. 3 UMK di Eks Karesidenan Surakarta (Rupiah)



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.3 menunjukkan UMK di Eks Karesidenan Surakarta, setiap daerah melakukan pembaruan terhadap tingkat upah minimum di daerahnya dan cenderung meningkat tiap tahun. Naiknya UMK diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah wilayah tersebut.

B. Perumusan masalah

Eks Karesidenan Surakarta merupakan wilayah dengan nilai sejarah tinggi, di dalam kawasan ini terdapat berbagai destinasi wisata yang akan meningkatkan perekonomian. Terlebih lagi, wilayah-wilayah di Eks Karesidenan Surakarta kini juga mulai dilirik oleh para investor untuk mendirikan sektor produksinya, selain lokasinya yang strategis di jantung pulau Jawa, tingkat upah di kawasan ini juga tergolong masih rendah. Dengan kondisi tersebut, pemerintah di setiap wilayah harusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka.

Pendapatan asli daerah merupakan representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah yang meningkat merupakan salah satu indikator terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka rumusan masalah yang ingin disampaikan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis arah dan besarnya pengaruh upah minimum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019.
2. Menganalisis arah dan besarnya pengaruh penanaman modal asing terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019.
3. Menganalisis arah dan besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah masing-masing daerah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019.
2. Melalui penelitian ini pemerintah masing-masing daerah dapat mengidentifikasi pengaruh upah minimum, penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah wilayahnya.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019. Untuk

menganalisis besarnya pengaruh independen terhadap dependen maka penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Formulasinya adalah sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 UMK_{it} + \widehat{\beta}_2 PMA_{it} + \widehat{\beta}_3 PE_{it} + \hat{e}_{it}$$

di mana:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)
UMK	: Upah Minimum Kabupaten atau Kota (rupiah)
PMA	: Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)
PE	: Pertumbuhan Ekonomi (miliar rupiah)
$\widehat{\beta}_0$: Konstanta
$\widehat{\beta}_1, \widehat{\beta}_2, \widehat{\beta}_3$: Koefisien variabel independen
i	: <i>Cross section</i>
t	: Tahun ke- t
\hat{e}	: Residual

E.2. Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif, yaitu metode pengumpulan dengan melalui data yang sudah ada sebelumnya atau data sekunder yang berupa artikel, buku, atau laporan penelitian terdahulu yang ada di lembaga instansi terkait dalam penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten/Kota, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta selama periode 2015-2019. Data diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi, penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model analisis, serta data dan sumber data. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori terkait perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan pendapatan dan pembangunan daerah serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian, pembahasan tentang alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji pendukungnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan masing-masing variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup pada bab ini adalah interpretasi ekonomi yang mengungkapkan kondisi dan masalah Pendapatan Asli Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan pembahasan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, serta memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN